DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PUBLIK DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Nama Unit / Satker : DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. INHU.

Halaman 1

							CT	STATUS			
DOKUMEN		RINGKASAN ISI INFORMASI	PEMBUAT DOKUMEN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PENERBITAN DOKUMEN	TERSEDIA SETIAP SAAT	BERKALA	SERTA MERTA	DIKECUALIKAN		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
INFO	RMASI UMUM SKPD DISPENDA										
1	·	Dokumen Rencana Kerja Dipenda	Kasubbag Program	KADIPENDA	2013		$\sqrt{}$				
2	Renja Dinas Pendapatan Daerah	Dokumen Recana Program/Kegiatan Dipenda Periode 5 Tahun	Kasubbag Program	KADIPENDA	2013		$\sqrt{}$				
3	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi Dipenda Kab. Inhu	Kasubbag Umum	KADIPENDA	2014		V				
4	Tupoksi	Tugas Pokok dan Fungsi Dipenda	Kasubbag Umum	KADIPENDA	2013		V				
5	Kartu Inventarisasi Barang	Dokumen Aset Dipenda Kab. Inhu	Kasubbag Umum	KADIPENDA	2014		V				
6	Daftar Urutan Kepangkatan	Daftar Urutan Kepegawaian Pegawai Dipenda	Kasubbag Umum	KADIPENDA	2013		V				
7	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dipenda	Dokumen DPA Dipenda Kab. Inhu	Kasubbag Program	KADIPENDA	2013	V					
8	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Dipenda per semester	Catatan Laporan Realisasi Anggaran Dipenda	Kasubbag Keuangan	KADIPENDA	2013		V				
9	Aliran KAS Dipenda	Catatan Aliran Kas Dipenda per Tahun	Kasubbag Keuangan	KADIPENDA	2013		V				
10	Neraca Keuangan SKPD	• .	Kasubbag Keuangan	KADIPENDA	2013		V				
11	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD	Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dipenda	Kasubbag Umum	KADIPENDA	2013	V					
TUP	OKSI Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Inhu										
Info	masi Terkait Peraturan Perundang Undangan										
1	Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Perda Pajak	Dipenda	Bupati INHU	2011	$\sqrt{}$					
2	Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	Perda Retribusi	Dipenda	Bupati INHU	2012	$\sqrt{}$					
3	Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	Perda Retribusi	Dipenda	Bupati INHU	2012	V					

					TAHUN	STATUS				
DOKUMEN		INFORMASI	PEMBUAT DOKUMEN	PENANGGUNG JAWAB	PENERBITAN DOKUMEN	TERSEDIA SETIAP SAAT	BERKALA	SERTA MERTA	DIKECUALIKAN	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Perda Retribusi	Dipenda	Bupati INHU	2012	\checkmark				
5	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2011 tentang NJOP Pajak Penerangan Jalan	Perbup Pajak	Bid PPP	Kadipenda	2011	$\sqrt{}$				
6	Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Pajak Hotel	Perbup Pajak	Bid PPP	Kadipenda	2011	V				
7	Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2011 tentang NJOP - Mineral Bukan Logam	Perbup Pajak	Bid PPP	Kadipenda	2011	V				
8	Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan	Perbup Pajak	Bid PPP	Kadipenda	2011	V				
9	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pajak Reklame	Perbup Pajak	Bid PPP	Kadipenda	2011	V				
10	Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Perbup Pajak	Bid PPP	Kadipenda	2011	V				
11	Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pajak Air Tanah	Perbup Pajak	Bid PPP	Kadipenda	2011	V				
12	Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pajak Reklame dan Nilai Strategis	Perbup Pajak	Bid PPP	Kadipenda	2011	V				
13	Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Pajak Hiburan	Perbup Pajak	Bid PPP	Kadipenda	2011	V				
14	Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Restoran	Perbup Pajak	Bid PPP	Kadipenda	2011	V				
15	Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Air Tanah	Perbup Pajak	Bid PPP	Kadipenda	2011	V				
16	Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Parkir	Perbup Pajak	Bid PPP	Kadipenda	2011	V				
17	Peratuan Bupati Nomor 69 Tahun 2011 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan PBB-P2	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	V				
	Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2011 tentang Penentuan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB-P2	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	V				
19	Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2011 tentang tata cara Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB-P2	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	V				
20	Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Penilaian Objek Pajak Baru PBB-P2	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	1				
21	Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tata cara Mutasi Objek Pajak dan Penerbitan Salinan SPPT PBB	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	1				

				PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PENERBITAN DOKUMEN	STATUS					
	DOKUMEN	INFORMASI	PEMBUAT DOKUMEN			TERSEDIA SETIAP SAAT	BERKALA	SERTA MERTA	DIKECUALIKAN		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
22	Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang SPPT-PBB	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	$\sqrt{}$					
23	Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2011 tentang Penelitian Surat Pemberitahuan Pajak terutang SPPT PBB	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	$\sqrt{}$					
24	Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	$\sqrt{}$					
25	Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2011 tentang tata cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	V					
26	Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2011 tentang tata cara Pengajuan Penyelesaian Keberatan dan Banding PBB-P2	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	$\sqrt{}$					
27	Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2011 tentang Penanganan Permohonan Peninjauan Kembali atas Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang keputusan bandingnya Tidak dapat Diterima	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	V					
28	Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	V					
29	Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2012 tentang tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB-P2	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	V					
30	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2012 tentang tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	√					
31	Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2011 tentang tata cara Penghapusan Piutang PBB-P2 dan Penetapan Besarnya Penghapusan	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	V					
32	Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2011 tentang tata cara Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa PBB-P2	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	V					
33	Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2011 tentang tata cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	V					
34	Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2012 tentang tata cara Penerbitan Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) Perhitungan Kelebihan Pembayaran dan Pemberian Imbalan Bunga PBB-P2	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	V					

		INFORMASI PEMBUAT DOKUMEN	T	TALLIN	STATUS					
	DOKUMEN			PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PENERBITAN DOKUMEN	TERSEDIA SETIAP SAAT	BERKALA	SERTA MERTA	DIKECUALIKAN	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2011 tentang tata cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran PBB-P2	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	$\sqrt{}$				
36	Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2011 tentang tata cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	V				
37	Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran PBB-P2 dan Bentuk serta Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	V				
38	Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2012 tentang tata cara Pembayaran Angsuran atau Penundaan Pembayaran PBB-P2	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	V				
39	Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	V				
40	Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2012 tentang tata cara Pembetulan Kesalahan Tulis Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan dalam Surat Tagihan Pajak Daerah PBB-P2	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	V				
41	Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2012 tentang tata cara Penyampaian Laporan dan Pemberian Keterangan dari Pejabat yang dalam jabatannya Berkaitan Langsung/Ada Hubungannya dengan Subjek dan Objek PBB-P2	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	V				
42	Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2011 tentang tata cara Penerbitan dan Bentuk Surat keterangan Bebas PBB-P2	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	V				
43	Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2011 tentang Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan	Perbup Pajak	Bid PBB	Kadipenda	2011	V				
44	Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Perbup Pajak dan Retribusi	Penagihan	Kadipenda	2011	V				
45	Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 tentang tata cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Perbup Pajak dan Retribusi	Penagihan	Kadipenda	2011	V				
	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa	Perbup Pajak dan Retribusi	Penagihan	Kadipenda	2011	V				
	Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata cara Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Perbup Pajak dan Retribusi	Penagihan	Kadipenda	2011	V				
48	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Gangguan	Perbup Pajak dan Retribusi	Bid. PPP	Kadipenda	2011	√				
Infor	masi Terkait Kinerja Dispenda Sektor Perpajakan dan Retribusi									
	Data Wajib Pajak Daerah	Berisi informasi ringkas yang berkaitan dengan wajib pajak seperti Jumlah Wajib Pajak berdasarakan Klasifikasi	Bid. PPP	Kadipenda	2013		V			

					TAHUN		ST	ATUS	
	DOKUMEN	INFORMASI	PEMBUAT DOKUMEN	PENANGGUNG JAWAB	PENERBITAN DOKUMEN	TERSEDIA SETIAP SAAT	BERKALA	SERTA MERTA	DIKECUALIKAN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Data Wajib Pajak PBB	Berisi Informasi ringkas yang berkaitan dengan wajib pajak PBB seperti Jumlah Wajib Pajak Berdasarkan Klasifikasi	Bidang PBB	Kadipenda	2013		V		
3	Data Wajib Retribusi (WR) Daerah	Berisi Informasi ringkas Jenis Retribusi daerah dan Jumlah Wajib Retribusi berdasarkan Jenis Retribusinya	Bid. PPP	Kadipenda	2013		V		
4	Data Pemberitahuan SPPT	Berisi Informasi pemberitahuan SPPT kepada masyarakat baik surat edaran maupun surat pemberitahuan	Bidang PBB	Kadipenda	2013		V		
Infor	masi Tentang Pendapatan Daerah								
1	Laporan Target Pendapatan Daerah Awal Tahun dan Setelah Perubahan	Berisi Informasi yang berkaitan target pendapatan daerah tahun tertentu dalam setiap kali penyusunan proyeksi pendapatan, berdasarkan klasifikasi jenis pendapatan daerah	Kasubbag Program	Kadipenda	2013		V		
2	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Semesteran	Berisi Informasi mengenai Realisasi Pendapatan daerah, berdasarkan klasifikasi jenis	Kasubbag Program	Kadipenda	2013		V		
3	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Tahunan	Berisi Informasi Mengenai Realisasi Pendapatan daerah Berdasarkan Klasifikasi jenis pendapatan diakhir tahun (setelah	Kasubbag Program	Kadipenda	2013		V		
Infor	masi Terkait Evaluasi dan Pengawasan	In the second	ly. H. B.		0040		1		
1	Laporan Kinerja Evaluasi dan Monitoring	Berisi Ringkasan	Kasubbag Program	Kadipenda	2013		V		